

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGALOKASIAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA TAHUN 2014**

Febryani Syawaltika Dwi Praptiningsih
Universitas PGRI Yogyakarta

Abstract

The research purpose is to know the factors that influence to the allocation of social assistant expenditure. The factor that researched is Audit Opinion (OP), the characteristic size of region (PD), Intergovernmental Revenue (DP), Budget Surplus Previous Year (SPA), and job specialization (SP). The audit opinion divided into five opinion degrees in audit like: unqualified, unqualified with explanatory paragraph, fair with the exception, not fair, and disclaimer. The specialization is proxied by the head region background that divided into economical and non economical.

That research was done in the audited financial statement of local government district / cities in Java in 2014. This research was experiment with block design by purposive sampling with total sample was 68. The measurement used descriptive static and classical assumption test to know the data of heteroscedasticity or multi-collinearity. The research validation uses double regression such as coefficient test, f-test, and t-test.

The research result concludes that the independent variable of audit opinion, the characteristic size of region, and region autonomy are proven has influence and significant to the allocation of social assistant expenditure 2014. The significant level of each variable is about 0,004, 0,001, and 0,000. The variable of V audit opinion (OP), the characteristic size of region (PD), Intergovernmental Revenue (DP), Budget surplus previous year (SPA), region autonomy (PAD) and job specialization (SP) are together have influence to the allocation of social assistant expenditure 2014 with significant level is 0,000.

Key words: Audit Opinion, The Characteristic Size of Region, Intergovernmental Revenue, Budget Surplus Previous Year, Region Autonomy, Job Specialization, Social Assistant Expenditure

PENDAHULUAN

Salah satu pengeluaran pemerintah daerah yaitu beban bantuan sosial, dalam menyusun laporan keuangan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 merupakan peraturan yang menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi belanja bantuan sosial, tetapi peraturan belum mengatur lebih rinci.

Kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah daerah bersama DPRD berhak atas pengalokasian setiap anggaran yang dicantumkan pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) periode bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh belanja pembangunan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan sosial dengan mengalokasikan belanja bantuan sosial kedalam anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Pembangunan sosial bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup aspek pendapatan, konsumsi, sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, pengalokasian belanja bantuan sosial adalah penurunan angka kemiskinan (Sumardjo, 2010).

Bantuan Sosial / hibah sosial di pemerintah daerah kabupaten/kota yang dialokasikan untuk investasi sosial jangka panjang (infrastruktur)

bertujuan menyetarakan standar kehidupan, akibatnya masyarakat miskin tidak memperoleh keuntungan dan mereka bermigrasi ke kota untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Fenomena sosial tersebut menunjukkan masih terdapat permasalahan terkait pengalokasian bantuan / hibah sosial pada anggaran belanja daerah tingkat II di Indonesia. Tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dengan melakukan reformasi aturan yang berkaitan dengan penganggaran belanja bantuan sosial (Skoufias, 2013).

Terkait masalah yang terjadi maka dibutuhkan peraturan dalam pengelolaan belanja bantuan sosial. Peraturan tersebut mengalami reformasi, karena dianggap tidak menjadi jawaban atas permasalahan penyusunan anggaran bantuan sosial saat ini yang disebabkan oleh fenomena yang berbeda, maka dibentuklah peraturan yang telah dilakukan dua kali perubahan selama tahun 2011 yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 21 Tahun 2011 yang diperbaharui beberapa pasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka penelitian ini bertujuan

menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah di Indonesia terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial di Pulau Jawa Tahun 2014. Penelitian ini memfokuskan pada kepatuhan pengungkapan wajib akunakun yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) audited yang tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini menggabungkan beberapa karakteristik pemerintah daerah dari penelitian sebelumnya, serta variabel independen lain yaitu spesialisasi pekerjaan yang diprosikan dengan latar belakang kepala daerah tahun 2014.

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Buletin Teknis (Bultek) No. 10 tentang akuntansi belanja bantuan sosial tahun 2011 mendefinisikan belanja bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Ketentuan belanja bantuan sosial diatur dengan rinci dan jelas dalam Buletin Teknis (Bultek) No.10 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang akuntansi belanja bantuan sosial tahun 2011.

Manfaat yang hendak dicapai oleh belanja bantuan sosial telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81/PMK.05/2012, yang menjelaskan

bahwa tujuan dari belanja bantuan sosial adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial: untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
2. Perlindungan sosial: untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.
3. Pemberdayaan sosial: merupakan semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Jaminan sosial: merupakan skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
5. Penanggulangan kemiskinan: merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan bencana: merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pengecahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Opini audit tahun 2010 mempunyai pengaruh signifikan terhadap besaran dana yang dialokasikan kedalam belanja bantuan sosial tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) merupakan determinan dalam pengalokasian belanja bantuan sosial, karena audit yang dilakukan cenderung menekankan efisiensi anggaran di pemerintah kabupaten/kota (Rochmatullah, 2013). Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Opini audit berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.

Ukuran (size) pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Entitas yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melakukan pengungkapan. Besarnya tuntutan publik untuk melakukan pengungkapan akan berdampak pada tuntutan kinerja yang dimiliki entitas tersebut. Pemerintah daerah akan cenderung memberikan good news dalam mengungkapkan laporan keuangan.

Good news tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah (Sumardjo, 2010). Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H2: Karakteristik ukuran daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.

Intergovernmental revenue memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan belanja bantuan sosial. Pengungkapan belanja bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dimana pemerintah daerah akan cenderung untuk mengungkapkan rincian belanja bantuan sosial pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) jika ada tuntutan dan pengawasan dari kreditor serta pemerintah pusat sebagai pemberi dana perimbangan (Darmastuti, 2012). Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H3: Intergovernmental Revenue berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.

Perubahan Sisa Lebih Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap variabel perubahan belanja bantuan sosial pada kabupaten/kota di Aceh, hal tersebut bermakna bahwa pemerintah daerah berhasil menggunakan Sisa

Lebih Anggaran (SILPA) untuk melaksanakan program pemerintah daerah kabupaten/kota dalam hal kesejahteraan sosial masyarakat. Sisa Lebih Anggaran (SILPA) merupakan indikator efisiensi, karena Sisa Lebih Anggaran (SILPA) akan terbentuk bila terjadi surplus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan (Abdullah, 2015). Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H4: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal, sumber terbesarnya adalah dari pendapatan retribusi dan pajak dari rakyat terhadap belanja modal. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab besar dalam mengalokasikan dana bantuan sosial secara tepat yang dipengaruhi oleh sumber pendapatan pajak dari masyarakat (Darwanto, 2007). Maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H5: Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.

Pemerintah daerah yang memiliki administrator dimana spesialisasi pekerjaan ditunjukkan dengan keterampilan dan pelatihan yang tinggi khususnya di bidang pelaporan keuangan/akuntansi akan lebih besar keinginannya untuk mengadopsi Governmental Accounting Standards Board (GASB) 34 dibanding dengan yang memiliki keterampilan dan pelatihan yang rendah. Dengan logika yang sama, kepala daerah dan wakilnya yang berlatar belakang pendidikan ekonomi, termasuk akuntansi akan cenderung menyelenggarakan pengungkapan dan pelaporan keuangan yang lebih baik termasuk pengungkapan atas belanja bantuan sosial (Patrick, 2007). Maka hipotesis yang dapat dibuat adalah:

H6: Spesialisasi pekerjaan kepala daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja bantuan sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pulau Jawa tahun anggaran 2014.

METODE PENELITIAN

Sumber data yang diperoleh peneliti melalui media perantara berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan seperti buku, journal, dan internet.

Sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode

purposive sampling, pengambilan sampel dilakukan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Jawa yang menerbitkan laporan keuangan pemerintahan pada tahun 2014 auditan.
2. Laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap (data dan informasi).

Penelitian ini mengobservasi sekitar 119 laporan keuangan auditan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten/kota tahun 2014 namun terdapat 51 laporan keuangan tidak memberikan data yang lengkap, sehingga jumlah laporan keuangan yang diobservasi dalam penelitian ini sejumlah 68 laporan keuangan pemerintah daerah.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABLE

Belanja Bantuan Sosial (Y)

Belanja bantuan sosial merupakan beban yang dialokasikan Pemda sesuai dengan kebutuhan sosial daerah.

Belanja bantuan sosial diukur dengan cara menghitung jumlah bantuan sosial pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemda tahun 2014. Skala yang digunakan yaitu skala rasio.

Opini Audit (X1)

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemda tahun 2013.

Opini audit diukur dengan melihat Laporan Hasil Pemeriksaan masing-masing Pemda dengan menggunakan

derajat opini audit dari bawah antara lain: disclaimer(5), tidak wajar(4), wajar dengan pengecualian(3), wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas(2), dan wajar tanpa pengecualian(1). Skala yang digunakan adalah skala interval.

Karakteristik Ukuran Daerah (X2)

Karakteristik ukuran daerah adalah total pendapatan yang didapatkan oleh Pemda terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah tahun 2014.

Karakteristik ukuran daerah diukur dengan menghitung total pendapatan Pemda di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2014. Skala yang digunakan adalah skala rasio.

Intergovernmental Revenue (X3)

Intergovernmental revenue (dana perimbangan) adalah jumlah transfer pendapatan yang didapat dari pemerintah pusat. Dana perimbangan terdiri dari: dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus tahun 2014.

Dana perimbangan diukur dengan cara menghitung jumlah transfer pendapatan dari pemerintah pusat dalam LRA tahun 2014. Skala yang digunakan adalah skala rasio.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) (X4)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah sisa anggaran (penerimaan dan pengeluaran) tahun sebelumnya yang

diterima dan digunakan pada tahun berjalan.

SILPA diukur dengan cara menghitung jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun 2013 dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Skala yang digunakan adalah skala rasio.

Kemandirian Daerah (X5)

Kemandirian Daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kekayaan Pemda yang dihasilkan dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah tahun 2014.

Kemandirian Daerah diukur dengan cara menghitung jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing-masing Pemda. Skala yang digunakan adalah skala rasio.

Spesialisasi Pekerjaan (X6)

Spesialisasi Pekerjaan adalah latar belakang dari kepala daerah masing-masing Pemda tahun 2014.

Latar belakang pendidikan kepala daerah diukur dengan melihat latar belakang pendidikan yang berasal dari ekonomi dan non ekonomi yang dapat dilihat dari profil kepala daerah di website masing-masing Pemda. Pendidikan kepala daerah yang berasal dari ekonomi diberi nilai 1, dan non ekonomi diberi nilai 2. Skalah yang digunakan adalah skala dummy.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan tentang variabel dependen adalah belanja bantuan sosial dan variabel independen adalah opini audit (OP), Total Pendapatan Daerah (PD), Transfer Dana Perimbangan (DP), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SPA), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Spesialisasi Pekerjaan (SP). Gambaran dari statistik deskriptif dalam penelitian ini tampak seperti tabel dibawah ini

Tabel 1

Hasil Statistik Deskriptif

Ket	N	Min	Max
OP	68	1	3
PD	68	727.619.868.812	4.677.396.698.105
DP	68	449.752.498.951	2.098.370.936.940
SPA	68	48.470.000.000	877.089.154.745
PAD	68	59.674.800.000	2.307.323.863.978
SP	68	0	1

	Mean	Std. Deviation
OP	2,21	0,802
PD	1.906.814.498.681,34	852.806.294.241,304
DP	1.093.560.066.551,21	350.282.331.144,868
SPA	243.118.559.269,09	186.017.260.676,730
PAD	374.383.049.248,40	439.091.095.263,056
SP	0,50	0,504
BANSOS	11.705.723.466,37	11.431.784.708,728

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai rata – rata belanja bantuan sosial sebesar 11,705 miliar. Jumlah tersebut merupakan alokasi yang cukup kecil jika dibandingkan dengan rata – rata PD sebesar 1906 miliar, sehingga diperlukan untuk memperbesar dana belanja bantuan sosial yang dialokasikan dalam APBD Pemerintah Kabupaten/Kota. Rata – rata SPA sebesar 243,118 miliar, artinya bahwa sebagian besar Pemda memiliki

kekuatan/kemampuan membiayai kewajibannya, sehingga dapat memaksimalkan dana yang dialokasikan ke belanja bantuan sosial. Variabel IR menunjukkan bahwa setiap Pemerintah Kabupaten/Kota masih menggantungkan transfer dari pusat karena rata – rata IR sebesar 1.093 miliar atau 57,3 % dari jumlah PD.

Pengujian Asumsi Klasik

Regresi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model yang dipakai terjadi deviasi atau tidak. Metode regresi terdapat beberapa pengujian antara lain : uji normalitas, , uji heterokedastisitas dan uji multikolinearitas. Uji asumsi klasik yang dilakukan terlihat bahwa semua data terdistribusi normal, bebas dari multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Gambaran jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji	N	K-SZ	Tolerance	VIF	Sig.
Normalitas	68	1,305			0,66
Heteroskedastisitas	68				
OP					0,103
PD					0,156
DP					0,085
SPA					0,217
PAD					0,170
SP					0,257
Multikolinearitas	68				
OP			0,856	1,169	
PD			0,155	6,443	
DP			0,456	2,195	
SPA			0,260	3,843	
PAD			0,185	5,406	
SP			0,853	1,172	

Pengujian Analisis Linier Berganda

Analisis regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Analisis Regresi Berganda

Uji	Adjusted R Square	F	T	Sig.
Model Regresi				0,00
Koefisien Determinasi	0,987			
Uji F		881,448		
Uji T				
OP			3,007	0,004
PD			3,462	0,001
DP			-1,810	0,075
SPA			1,704	0,094
PAD			3,889	0,000
SP			0,111	0,912

Model regresi yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai dari probability value dalam penelitian ini adalah sebesar 0,000. Besarnya nilai tersebut mengindikasikan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5% yang menyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai model regresi pengujian hipotesis. Hasil pengujian dari koefisien determinasi pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,987 atau sebesar 98,7%. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa variabel independen opini audit, karakteristik Pemerintah Kabupaten/Kota, dan spesialisasi pekerjaan mampu menjelaskan variabel dependen belanja bantuan sosial sebesar 98,7%.

Sementara itu, sisanya sebesar 1,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Nilai uji f diperoleh harga f hitung sebesar 881.448 dikonsultasikan dengan t tabel pada taraf signifikansi 5% dan df 61 (k:7, n:68) sebesar 3,49. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa harga f hitung lebih besar dari f tabel ($881.448 > 3,49$). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa opini audit, total pendapatan daerah, transfer dana perimbangan, SILPA tahun sebelumnya, pendapatan asli daerah, dan latar belakang pendidikan kepala daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap belanja bantuan sosial.

Nilai Uji T memperlihatkan bahwa variable opini audit, pendapatan daerah, dan pendapatan asli daerah masing-masing memiliki tingkat signifikansi 0.004, 0.001, dan 0,000. Besarnya nilai tersebut mengindikasikan bahwa tingkat signifikansinya lebih kecil dari 5% yang menyatakan bahwa ketiga variable tersebut terbukti berpengaruh signifikan, dan variable independen lain tidak terbukti berpengaruh secara signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah opini audit, karakteristik pemerintah daerah, dan spesialisasi pekerjaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah

kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2014. Pendapatan daerah, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara terpisah terhadap Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian ini juga diharapkan adanya perbaikan dalam identifikasi kebutuhan yang akurat guna pengalokasian belanja bantuan sosial. Namun demikian pengukuran belanja bantuan sosial dalam penelitian ini berdasarkan pengujian yang dilakukan pada laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Jawa, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian di Indonesia. Selanjutnya untuk penelitian kedepan diharapkan menggunakan pengukuran yang lebih baik berdasarkan teknik kuesioner dan wawancara terhadap pengelola pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Sehingga bisa terdapat modifikasi dan perbandingan antara pengukuran menggunakan data primer dan sekunder.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2015. "Pengaruh perubahan PAD, perubahan DBH, dan perubahan SILPA terhadap perubahan belanja bantuan sosial". Jurnal magister akuntansi, 15: 1-10.
- Arif, Bachtiar. Muchlis, dan Iskandar. 2002. Akuntansi Pemerintahan.

- Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Biro Pusat Statistik Indonesia. Daerah Dalam Angka.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 10 Tahun 2011 Tentang Akuntansi Belanja Bantuan Sosial.
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No. 19 Tahun 2015 Tentang Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua
- Chaney, Barbara A. Paul A. Copley and Mary S. Stone. 2002. "The effect of fiscal stress and balanced budget requirements on the funding and measurement of state pension obligations". *Journal of accounting and public policy*, 21(4-5): 287–313.
- Darmastuti, Dewi dan Dyah Setyaningrum. 2012. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan belanja bantuan sosial pada laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2009". Simposium nasional akuntansi XV, Banjarmasin.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium nasional akuntansi X, Makassar.
- Elder, Randal J. Mark S. Beasley, Alvin A. Arens, dan Amir Abadi Jusuf, 2011. *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Fathony, Adi Dicka. 2011. Pengaruh pendapatan asli daerah, sisa lebih perhitungan anggaran dan dana alokasi umum terhadap perilaku oportunistik penyusun anggaran. Skripsi diterbitkan melalui eprints.undip.ac.id. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. dan Syukriy Abdullah. 2006. "Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah". *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2: No.1.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.(dicari)
- Kytle, Beth, Booz Allen Hamilton dan John Gerard Rguggie. 2005. *Corporate social responsibility as risk management a model for multinationals*. Working Paper No. 10. Cambridge: Business and Government Harvard University.
- Lesmana, Sigit Indra. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di indonesia. Thesis diterbitkan melalui digilib.uns.ac.id. Surakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.

- Lewis, Blande D dan Andre Oosterman. 2009. "The impact of decentralization on subnational government fiscal slack in Indonesia". Public financial publications, Inc(3): 27-47.
- Lowensohn, Suazanne. Laurence E. Johnson dan Randal J. Elder. 2007. "Auditor specialization , perceived audit quality , and audit fees in the local government audit market". Journal of accounting and public policy, 26: 705-732.
- Ma, Jun dan Yilin Hou. 2004. "Budgeting for accountability: a comparative study of budget reforms in the united states during the progressive era and in contemporary china". Economic development, public budgeting, and fiscal administration, 553-559.
- Manik, Tumpal. 2013. "Analisis pengaruh kemakmuran, ukuran pemerintah daerah, inflasi, intergovernmental revenue dan kemiskinan terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi". Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 9: No. 2.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Badan Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Patrick, Patricia A. 2007. The determinants of organizational innovativeness: the adoption of gasb 34 in pennsylvania local government. Thesis diterbitkan melalui etda.libraries.psu.edu. Pennsylvania: Public Administration Pennsylvania State University.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang: Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang: Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81/PMK.05/2012 tentang: Belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2013 tentang: Tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Pratama, Kadek Aris Dwi. Werastuti Desak Nyoman Sri dan Sujana Edy. 2015. "Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah , ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah, dan belanja daerah terhadap pelaporan

- keuangan pemerintah daerah”. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 3: No.1.
- Ridwan dan Nurlaela Maparessa. 2013. “Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Sesudah Disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011”. Simposium nasional akuntansi XVII. Lombok : Mataram.
- Rochmatullah, Mahameru Rosy dan Agung Nur Probohudono. 2013. “Praktik belanja bantuan sosial pemerintah daerah di indonesia”. Simposium nasional akuntansi XVII, Lombok: Mataram.
- Santosa, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu. 2005. “Analisis pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten kediri”. Dinamika pembangunan, Vol. 2: No. 1.
- Simamora, Sihar. 2014. “Pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terhadap belanja daerah”. Jurnal riset akuntansi dan bisnis, Vol. 14: No.2.
- Skoufias, Emmanuel dan Sergio Olivieri. 2013. “Sources of spatial welfare disparities in Indonesia: Household endowments or returns? “. *Journal of Asian Economics*, 29: 62–79.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko dan Aryane Dewi. 2010. “Pengungkapan risiko financial dan tata kelolah perusahaan: Studi empiris perbankan”. *Jurnal riset akuntansi dan bisnis*, Vol. 14, No.2: 105-108.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia). Skripsi diterbitkan eprints.uns.ac.id. Surakarta: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret.
- Suardjono. 2008. *Teori Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi. (dicari)
- Trisnawati, Mya Dewi dan Komarudin Achmad. 2014. “Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet”. *Jurnal Brawijaya*, Vol 2: No 2.